

Dampak Pemangkasan APBN Perubahan, Anggaran Keuangan Daerah Terancam



<http://palugadanews.com/>

PALEMBANG –

Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2016, ternyata telah mengancam keuangan daerah Pemprov Sumsel. Pasalnya, pemangkasan tersebut sangat berdampak pada keuangan daerah, seperti Dana Bagi Hasil (DBH)¹ dan beberapa sumber keuangan lainnya.

Sekretaris Daerah Sumsel, Mukti Sulaiman mengungkapkan, dengan adanya pemangkasan APBN Perubahan, para gubernur meminta agar dana triwulan keempat segera ditransfer ke daerah. Selain itu, Pemda baik provinsi ataupun kabupaten mengharapkan agar APBN bagi hasil apakah itu DBH, hasil pajak² atau dana dekonsentrasi³ dilakukan percepatan.

“Ya, kalau bisa dipercepat turunnya, jangan sampai sudah Desember baru turun. Bagaimana melaksanakan programnya nanti,” kata Mukti. Untuk mengurangi dampak pemangkasan tersebut, Mukti menambahkan, pihaknya harus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁴ seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan lain sebagainya. Pihaknya juga meminta kepada daerah di Sumsel untuk mencari celah agar dapat meningkatkan PAD Sumsel.

“Untuk dampak yang sangat terasa di Pemprov Sumsel sendiri, yakni seperti tertundanya pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) Pegawai. Kemudian kegiatan yang tidak urgent terpaksa ditunda seperti kursus, dan lain sebagainya sehingga ruang gerak Pemprov pun terbatas,” terangnya.

Dilanjutkannya, sejauh ini untuk pembayaran DBH triwulan ke empat tahun 2015 baru akan dilaksanakan pada bulan April mendatang dengan dana sekitar Rp 900 miliar. Sedangkan untuk DBH triwulan pertama tahun 2016 baru akan dicairkan pada Juni mendatang dengan dana sekitar Rp 1,2 triliun.

“Pencairan ini memang bertahap dilakukan. Tapi kami berharap untuk DBH triwulan ke empat itu segera dibayarkan,” harapnya. Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin, juga membenarkan bahwa pemangkasan APBN Perubahan untuk tahun 2016 ini nantinya akan sangat berdampak kepada keuangan daerah.

“Pemangkasan ini sudah terjadi dari tahun kemarin. Kita bahkan kekurangan Rp 800 miliar dari DBH,” ujarnya. Karena itu, Alex meminta kepada Pemerintah Pusat untuk meneliti ulang DBH karena yang mengalami penurunan tersebut minyak bukan gas, sedangkan yang selama ini diekspor Sumsel adalah gas.

“Kita mengekspor gas itu 80 persen, sedangkan minyak hanya 20 persen. Meskipun harus turun kalau bisa jangan sampai begitu. Karena itu kami meminta untuk DBH ini diteliti ulang,” pungkas Alex.

Sumber Berita:

1. palembang-pos.com, Minggu, 27 Maret 2016
2. sumselprov.go.id, *Pemangkasan APBN-P Ancam Keuangan Daerah*, Jumat, 25 Maret 2015
3. nasional.sumeksminggu.com, *DENGAR NIH, Pak Alex Bilang, APBD Pusat Dipangkas, Bisa Berdampak BESAR*, Minggu, 26 Maret 2016

¹ Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)

² Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam (Pasal 11 ayat (1) UU No 33 Tahun 2004)

³ Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah (Pasal 1 angka 26 UU No 33 Tahun 2004)

⁴ Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 18 UU No 33 Tahun 2004)